



Kemiskinan Kultural dan Strategi Bertahan Hidup

(Studi Tentang Perilaku Pencurian Buah Sawit oleh Masyarakat Lokal di Perkebunan PT Wilmar)

Cindy Aulia ^{1*}, Rholand Muary ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : sindiauliaq18@gmail.com ¹, rholandmuary@uinsu.ac.id ²

*Penulis Korespondensi: sindiauliaq18@gmail.com

Abstract. *This study examines the paradox of the growth of Indonesia's palm oil industry, where the impressive economic expansion of giant corporations such as PT Wilmar contrasts sharply with the declining quality of the living environment of local communities, particularly in South Labuhanbatu Regency. Employing a multi-perspective approach that integrates the theories of structural exclusion, cultural poverty, and James Scott's moral economy, this study aims to analyze the phenomenon of fresh fruit bunch (FFB) theft, commonly referred to as "palm oil ninjas," not merely as an act of criminality but as a manifestation of everyday resistance and a form of negotiated redistribution of wealth. Based on secondary data analysis and a comprehensive review of relevant literature, the conversion of customary land into Hak Guna Usaha (HGU) concessions has triggered systemic marginalization, undermined local food sovereignty, and created dependence on vulnerable wage labor. This condition has been exacerbated by the ineffectiveness of Corporate Social Responsibility (CSR) programs and the unequal allocation of Village Funds, resulting in social dysfunction and the intergenerational normalization of cultural poverty. The novelty of this study lies in the reconceptualization of palm oil theft as a form of negotiated redistribution within the context of contemporary agrarian inequality. The findings recommend reformulating CSR programs and developing participatory and inclusive plasma plantation schemes to reconstruct the social contract between corporations and local communities.*

Keywords: Corporation; Cultural Poverty; Everyday Resistance; Palm Oil Industry; Structural Exclusion.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji paradoks pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia, di mana kemegahan ekspansi ekonomi korporasi raksasa seperti PT Wilmar berbanding terbalik dengan kualitas ruang hidup masyarakat lokal, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Melalui pendekatan multi-perspektif yang mengintegrasikan teori eksklusi struktural, kemiskinan kultural, dan ekonomi moral James Scott, studi ini bertujuan untuk membedah fenomena pencurian tandan buah segar (TBS) atau "ninja sawit" bukan sekadar sebagai tindak kriminalitas murni, melainkan sebagai manifestasi perlawanan laten (*everyday resistance*) dan negosiasi redistribusi kekayaan. Berdasarkan analisis data sekunder dan literatur terkait, alih fungsi lahan adat menjadi Hak Guna Usaha (HGU) telah memicu marjinalisasi sistemik, memutus kedaulatan pangan, dan menciptakan ketergantungan buruh upahan yang rentan. Kondisi ini diperparah oleh kegagalan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan bias alokasi Dana Desa yang melahirkan disfungsi sosial serta normalisasi kemiskinan kultural secara antargenerasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonseptualisasi praktik pencurian sawit sebagai bentuk *negotiated redistribution* di tengah ketimpangan agraria modern. Hasil studi ini merekomendasikan reformulasi program CSR dan skema kebun plasma yang partisipatif dan inklusif guna merekonstruksi kontrak sosial antara korporasi dan komunitas lokal.

Kata Kunci: Eksklusi Struktural; *Everyday Resistance*; Industri Kelapa Sawit; Kemiskinan Kultural; Korporasi.

1. PENDAHULUAN

Industri kelapa sawit di Indonesia telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi deterministik yang menopang stabilitas makroekspor dan penerimaan devisa negara. Sebagai pemain kunci global, korporasi raksasa seperti PT Wilmar mencatatkan ekspansi yang masif melalui penguasaan konsesi lahan yang luas. Namun, pertumbuhan ekonomi yang impresif ini menyisakan anomali sosiologis di tingkat akar rumput. Kemegahan angka-angka pertumbuhan

ekonomi korporasi justru berbanding terbalik dengan kualitas hidup masyarakat lokal di sekitar wilayah konsesi (Vira dkk., 2025). Kemakmuran yang dihasilkan bersifat sangat eksklusif, di mana akumulasi manfaat ekonomi hanya dinikmati oleh aktor-aktor besar, sementara masyarakat desa terjebak dalam stagnasi ekonomi dan marjinalisasi sistemik. Ketimpangan ini berakar pada perubahan drastis struktur agraria. Lahan subsisten komunal dan wilayah adat beralih status menjadi wilayah konsesi (seperti HGU) melalui mekanisme "eksklusi struktural," yang menghilangkan akses masyarakat atas tanah produktif mereka (Fikri dkk., 2025). Akibatnya, rantai kedaulatan pangan terputus, memaksa petani mandiri bertransformasi menjadi buruh harian lepas (BHL) dengan upah subsisten dan minim perlindungan sosial.

Data BPS Provinsi Sumatera Utara (2023) menunjukkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai basis produksi kelapa sawit, masih menyisakan 9,89% (sekitar 31.000 jiwa) penduduk miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,32%. Hal ini diperburuk oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, di mana lebih dari 58% angkatan kerja di sekitar areal konsesi hanya berpendidikan SD atau SMP (Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2023). Tekanan struktural yang berkepanjangan ini melahirkan fenomena Kemiskinan Kultural (Tuti dkk., 2021). Kemiskinan tidak lagi sekadar ketiadaan material, melainkan berkembang menjadi sistem nilai dan pola hidup pasrah yang dinormalisasi antargenerasi (Lewis, 1966). Kegagalan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang cenderung *charity-based*, serta penyaluran Dana Desa yang bias pada infrastruktur fisik, semakin memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan korporasi (Hudayana dan Nurhadi, 2020; Tuti Alawiyah dan Farhan Setiawan, 2021).

Kemiskinan struktural yang ternormalisasi ini memicu berbagai manifestasi disfungsi sosial, seperti perjudian (Nainggolan dkk., 2021) dan penyalahgunaan narkoba. Namun, manifestasi yang paling menonjol dan menjadi fokus utama adalah pencurian sumber daya perkebunan atau yang lazim disebut sebagai fenomena "ninja sawit". Data Polres Labuhanbatu Selatan (2020–2024) mencatat tren konsisten kasus pencurian TBS, sebuah pola yang juga berulang di wilayah konflik agraria lainnya di Indonesia seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat (Margaret, 2023; Ikhsan dkk., 2025). Melalui lensa psikologi sosial dan Teori Strain Merton (1938), ketika akses terhadap kesejahteraan yang sah ditutup oleh dominasi korporasi, masyarakat akan mencari jalur alternatif. Lebih jauh, dalam kacamata pemikiran James Scott mengenai *moral economy*, praktik pencurian ini bukanlah kriminalitas murni, melainkan manifestasi dari etika subsistensi (*safety-first*). Pencurian sawit dipandang sebagai perlawanan laten (*weapons of the weak/ everyday resistance*) untuk mengoreksi

ketidakadilan agraria ketika kontrak sosial antara masyarakat lokal dan entitas penguasa lahan telah dikhianati (Ikhsan dkk., 2025).

Penelitian ini dibangun di atas fondasi beberapa studi terdahulu yang mengkaji dinamika sosio-ekonomi di sekitar wilayah perkebunan sawit. Kajian mengenai strategi bertahan hidup oleh Margaret (2023) mengungkapkan bahwa kerentanan ekonomi memaksa buruh tani melakukan diversifikasi kerja ekstrem di zona abu-abu hukum. Namun, studi tersebut terbatas pada aspek ekonomi rumah tangga tanpa menyentuh dimensi kultural dan konstruksi legitimasi moral komunitas. Dari aspek kriminologi pedesaan, Puspita dkk. (2025) menangkap fenomena pencurian sawit (*ngobrok*) sebagai tindakan yang dianggap "halal" secara sosial akibat faktor sejarah lahan. Sayangnya, analisisnya cenderung reduksionis karena melihatnya sebatas persoalan hukum dan budaya lokal, serta mengabaikan relasi kuasa korporasi. Di sisi lain,

Nainggolan dkk. (2021) mengkritik ekspansi sawit skala besar yang memicu "paradoks kemakmuran" dan kemiskinan kultural. Namun, pendekatan makro-struktural yang dominan di dalamnya gagal menjelaskan bagaimana dampak tersebut diterjemahkan ke dalam resistensi keseharian masyarakat. Sementara itu, Laila dkk. (2025) mencoba memasukkan dimensi moral-keagamaan melalui etika subsistensi dalam praktik ekonomi informal, tetapi studinya masih bersifat normatif-deskriptif dan belum menempatkan praktik pencurian sebagai bentuk *everyday resistance*. Terakhir, Lumban (2024) menyoroti bagaimana lemahnya partisipasi masyarakat dalam perizinan lahan memicu resistensi laten berupa pengambilan buah ilegal. Celah yang tersisa dari penelitian Lumban adalah absennya pendalaman aspek psikososial (kemiskinan kultural) dan negosiasi nilai halal-haram.

Melalui pemetaan tersebut, letak kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam studi ini berada pada ketiadaan kerangka integratif yang mampu menghubungkan struktur ekonomi-politik makro (eksklusi lahan oleh korporasi) dengan respon mikro-sosiologis masyarakat (justifikasi moral dan dramaturgi sosial). Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan merekonseptualisasi fenomena "ninja sawit" bukan sebagai kriminalitas individual murni, melainkan sebagai bentuk *negotiated redistribution* (negosiasi ulang distribusi sumber daya) yang terinstitusionalisasi.

Untuk membedah rasionalitas di balik normalisasi tersebut, teori ekonomi moral dari James C. Scott (1976) menyediakan pisau analisis yang relevan melalui konsep etika subsistensi (*subsistence ethic*). Scott berargumen bahwa masyarakat agraris miskin tidak digerakkan oleh motif maksimalisasi keuntungan kapitalistik, melainkan oleh prinsip *safety-first* (selamat dulu). Hak untuk menyambung hidup merupakan hukum moral tertinggi yang

berada di atas hukum formal negara. Ketika eksklusi struktural memutus akses masyarakat terhadap ruang hidup tradisional mereka, tindakan mengambil buah sawit perusahaan diposisikan sebagai bentuk strategi bertahan hidup aktif. Lebih jauh, Scott (1985) lewat konsep *weapons of the weak (everyday resistance)* menjelaskan bahwa kelompok subordinat yang tidak memiliki daya tawar politik akan memilih bentuk perlawanan diam-diam, terselubung, dan tidak terorganisir guna menghindari konfrontasi langsung dengan aparat keamanan. Praktik "ninja sawit" adalah perwujudan konkret dari senjata kaum lemah ini; sebuah upaya menegosiasikan kembali isi piring di rumah di tengah ketimpangan distribusi kekayaan yang mencolok.

Secara makro, ketegangan antara masyarakat dan korporasi berakar pada pertentangan kelas yang digagas oleh Karl Marx (1867). Dalam struktur kapitalisme perkebunan modern, korporasi seperti PT Wilmar bertindak sebagai kelas Borjuis yang menguasai alat produksi utama—berupa konsesi Hak Guna Usaha (HGU) yang masif—sementara masyarakat lokal terdorong menjadi kelas Proletar yang hanya memiliki tenaga kerja untuk dijual sebagai Buruh Harian Lepas (BHL). Marx menjelaskan bahwa akumulasi modal penguasa selalu berbanding lurus dengan pemiskinan dan keterasingan (*alienasi*) pekerja. Hukum dan kebijakan negara dalam corak produksi kapitalistik cenderung berfungsi sebagai alat pelindung kepentingan kapitalis. Oleh karena itu, konflik agraria dan marginalisasi lokal yang terjadi di Labuhanbatu Selatan bukanlah anomali insidental, melainkan konsekuensi logis dari model bisnis perkebunan yang eksploitatif. Praktik *ngobrok* atau pencurian TBS pada dasarnya adalah manifestasi dari benturan kelas yang laten; sebuah respon pragmatis kelas proletar dalam mengekspresikan ketidakpuasan terhadap dominasi dan perampasan ruang hidup oleh elit kapitalis.

Guna menjembatani analisis makro struktural kapitalisme dengan tindakan mikro di lapangan, penelitian ini mengintegrasikan pemikiran Jürgen Habermas dan Erving Goffman. Habermas (1984) memetakan ketegangan sosial melalui dikotomi antara "Sistem" (*system*—institusi formal, uang, kekuasaan korporasi) dan "Dunia Kehidupan" (*lifeworld*—ranah sosial, nilai, budaya komunal). Konflik akut meledak ketika Sistem melakukan kolonisasi terhadap Dunia Kehidupan. Di sekitar areal PT Wilmar, kolonisasi ini mewujud dalam penguasaan lahan ulayat secara sepihak dan penyumbatan saluran komunikasi/dialog yang setara. Karena distorsi komunikatif ini, masyarakat memutus hubungan patuh dengan Sistem dan membangun rasionalitas alternatif di luar korporasi. Rasionalitas alternatif ini kemudian dikelola secara sosial melalui mekanisme dramaturgi dari Erving Goffman (1959, 1963). Goffman menjelaskan bahwa individu membagi ruang sosialnya menjadi panggung depan (*front stage*)

dan panggung belakang (*back stage*). Pelaku "ninja sawit" melakukan manajemen identitas yang berlapis untuk menghindari stigma kriminal dan tindakan represif aparat. Di panggung depan, mereka mempresentasikan diri secara normatif sebagai warga desa biasa atau buruh perkebunan yang patuh di hadapan manajemen perusahaan dan aparat hukum. Namun, di panggung belakang, dalam interaksi intersubjektif sesama komunitas yang senasib, mereka melepaskan topeng kepatuhan tersebut dan secara aktif mengorganisir serta menormalisasi praktik pencurian sawit sebagai bentuk redistribusi ekonomi yang sah.

2. TINJAUAN TEORITIS

Teori Kemiskinan Kultural

Teori kemiskinan kultural yang diperkenalkan oleh Oscar Lewis menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan ekonomi, tetapi juga sebagai pola nilai, kebiasaan, dan cara pandang yang diwariskan secara antargenerasi. Dalam masyarakat yang mengalami kemiskinan berkepanjangan, terbentuk budaya pasrah, rendahnya orientasi terhadap pendidikan, lemahnya partisipasi sosial, serta ketergantungan terhadap sumber penghidupan yang tidak stabil. Pada masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit, kondisi tersebut semakin menguat akibat terbatasnya akses terhadap sumber daya produktif dan kesempatan ekonomi yang layak. Akibatnya, berbagai strategi bertahan hidup berkembang sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi, termasuk aktivitas yang berada di luar norma hukum formal. (Lewis, 1966).

Teori Eksklusi Struktural

Teori eksklusi struktural menjelaskan bahwa kemiskinan sering kali merupakan hasil dari proses sosial, politik, dan ekonomi yang menutup akses kelompok tertentu terhadap sumber daya, hak, dan kesempatan pembangunan. Dalam konteks industri kelapa sawit, perluasan Hak Guna Usaha (HGU) menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap tanah adat maupun lahan produktif yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan utama. Perubahan struktur agraria tersebut mendorong masyarakat beralih menjadi buruh harian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan posisi tawar yang lemah. Eksklusi ini tidak hanya menghasilkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga memperkuat marginalisasi sosial yang memengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat. (Ikhsan dkk., 2025).

Teori Ekonomi Moral James C. Scott

James C. Scott melalui teori ekonomi moral menjelaskan bahwa masyarakat agraris miskin lebih mengutamakan prinsip keselamatan hidup (*safety-first*) dibandingkan pencapaian keuntungan ekonomi yang maksimal. Dalam kondisi ketika akses terhadap sumber

penghidupan tertutup akibat perubahan struktur ekonomi, tindakan yang secara hukum dianggap melanggar dapat dipandang sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga. Scott menegaskan bahwa masyarakat pedesaan memiliki standar moral tersendiri mengenai keadilan distribusi sumber daya, sehingga tindakan mengambil hasil perkebunan sering dipersepsikan sebagai bentuk pemulihan hak ekonomi yang dianggap telah hilang. (Scott, 1976).

Teori *Everyday Resistance*

Konsep *everyday resistance* menjelaskan bahwa kelompok masyarakat yang berada pada posisi subordinat cenderung melakukan bentuk-bentuk perlawanan yang tidak terbuka, tidak terorganisasi, dan berlangsung dalam aktivitas sehari-hari. Perlawanan tersebut dilakukan untuk menghindari konflik langsung dengan pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar, seperti negara maupun korporasi. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, praktik pencurian buah sawit dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perlawanan tersembunyi terhadap dominasi ekonomi dan penguasaan lahan oleh perusahaan. Tindakan tersebut menjadi mekanisme sosial yang digunakan masyarakat untuk mempertahankan keberlangsungan hidup sekaligus menyampaikan ketidakpuasan terhadap ketimpangan distribusi manfaat pembangunan. (Scott, 1976).

Teori Konflik Karl Marx

Teori konflik Karl Marx memandang bahwa ketimpangan sosial muncul akibat penguasaan alat produksi oleh kelompok pemilik modal yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap kelompok pekerja. Dalam industri perkebunan kelapa sawit, perusahaan menguasai modal, lahan, serta proses produksi, sedangkan masyarakat lokal lebih banyak berperan sebagai buruh yang memiliki keterbatasan akses terhadap kepemilikan sumber daya. Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang tidak seimbang dan memunculkan konflik kepentingan antara korporasi dengan masyarakat sekitar. Ketika manfaat ekonomi dari keberadaan perusahaan tidak terdistribusi secara adil, berbagai bentuk resistensi sosial berpotensi muncul sebagai respons terhadap ketidaksetaraan tersebut. (Marx, 1867).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berpijak pada filsafat postpositivisme untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2019). Desain yang diterapkan adalah tipe studi kasus (*bounded system*) guna mengeksplorasi fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata secara mendalam dan kaya konteks (Creswell, 2014). Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menangkap

esensi makna di balik tindakan fisik *ngobrok* atau "ninja sawit", serta menggali konstruksi realitas sosial dan alasan-alasan subjektif masyarakat lokal dalam merespons tekanan struktural serta ketimpangan relasi kuasa perkebunan besar. Melalui kerangka ini, kasus pencurian sawit tidak dilihat sebagai variabel tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks dari sejarah penguasaan lahan, keterbatasan akses ekonomi, dan reproduksi kemiskinan kultural. Fokus penelitian pun digeser dari sekadar pembuktian kriminalitas murni menuju pemahaman mendalam atas pembelaan moral ekonomi komunitas.

Lokasi penelitian ditetapkan di pemukiman masyarakat Desa Batang Seponggol, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, yang berbatasan langsung dengan area konsesi Hak Guna Usaha (HGU) PT Wilmar. Lokasi ini dipilih karena memiliki kompleksitas konflik agraria yang menjadi pemicu utama munculnya kemiskinan kultural di tingkat tapak. Mengingat topik ini berkaitan dengan tindakan ilegal dan kelompok sosial yang cenderung tertutup, penentuan subjek penelitian (informan) dilakukan melalui teknik *snowball sampling*. Peneliti memulai pengumpulan data dari satu informan kunci yang bertindak sebagai *gatekeeper* untuk membuka akses secara bertahap kepada informan berikutnya demi menghindari resistensi lapangan. Informan dalam penelitian ini didefinisikan secara berlapis, meliputi pelaku "ninja sawit" untuk menggali motif subsistensi, tokoh agama (imam masjid dan pendeta) untuk memetakan pandangan moral-keagamaan lokal, aparat pemerintah desa untuk memperoleh data demografi dan riwayat konflik, serta pihak keamanan atau humas PT Wilmar sebagai representasi pandangan korporasi.

Pengumpulan data bersandar pada dua rumpun sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun langsung di lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama para informan untuk memahami rasionalitas tindakan mereka, yang dikombinasikan dengan observasi langsung guna mengamati kondisi sosio-ekonomi harian serta pola interaksi komunitas dengan lingkungan perkebunan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan sebagai instrumen pendukung untuk memperkuat analisis struktural, yang diperoleh melalui dokumen resmi laporan desa, data statistik ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan tahunan atau CSR perusahaan, kliping berita media massa, serta literatur akademik terkait. Integrasi kedua sumber data ini berfungsi untuk membangun validitas temuan melalui teknik triangulasi, memberikan konteks struktural makro, serta memperkuat argumentasi mengenai paradoks kemakmuran dan ketimpangan ekonomi di wilayah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengumpulan data primer dilakukan melalui kombinasi teknik observasi partisipatif pasif dan wawancara mendalam yang dilakukan secara persuasif serta informal. Observasi partisipatif pasif difokuskan pada pengamatan langsung terhadap ritme kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar perkebunan PT Wilmar tanpa melibatkan diri dalam aktivitas ilegal. Aspek yang diamati meliputi pola mata pencaharian, kondisi ekonomi rumah tangga, tingkat ketergantungan hidup pada sektor sawit, serta situasi sosial yang melatarbelakangi munculnya praktik *ngobrok* guna menangkap manifestasi kemiskinan kultural yang terbentuk secara alami.

Sementara itu, wawancara informal digunakan untuk menggali kedalaman persepsi komunitas atas klaim kepemilikan lahan, motif ekonomi di balik fenomena "ninja sawit", dualisme antara legalitas hukum formal dan legitimasi moral lokal, serta pengalaman konflik penegakan aturan dengan pihak korporasi maupun aparat keamanan. Guna memperkuat keabsahan data lapangan, teknik dokumentasi diterapkan dengan menghimpun visualisasi kondisi permukiman, arsip surat pengaduan konflik lahan, kliping berita media massa lokal, serta dokumen sosio-ekonomi dari arsip pemerintahan desa. Integrasi ragam teknik ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen triangulasi untuk menguji validitas temuan, melainkan juga menyediakan landasan empiris yang kuat dalam membedah paradoks kemakmuran dan dinamika resistensi di wilayah penelitian.



Gambar 1. Proses Pengumpulan Data.

Source: Sintesis penulis berdasarkan dokumen yang ditinjau

Gambaran Umum Lokasi dan Karakteristik Informan

Desa Batang Sepunggol, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, merupakan wilayah administratif yang berbatasan langsung dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Milano (anak perusahaan PT Wilmar International). Secara demografis (data 2024), desa ini dihuni oleh sekitar 3.200 jiwa (780 KK) dengan komposisi etnis Batak Angkola, Jawa, dan Melayu. Mayoritas penduduk menggantungkan hidup sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) perkebunan sawit, petani lahan sempit, dan pedagang kecil. Kondisi sosio-ekonomi wilayah ini mencerminkan paradoks nyata: berada di tengah pusat produksi sawit bernilai miliaran rupiah, namun masyarakatnya terjebak dalam marjinalisasi akibat minimnya infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan akses pendidikan. Ketegangan sosial ini berakar pada sejarah penguasaan lahan era 1980–1990-an, di mana tanah ulayat dialihkan menjadi HGU secara tidak transparan, ditambah dengan belum terealisasinya kewajiban kebun plasma sebesar 20% bagi komunitas lokal. Untuk membedah fenomena ini, penelitian melibatkan 12 orang informan yang dipilih melalui teknik *snowball sampling*, terdiri dari: 6 pelaku "ninja sawit", 2 tokoh agama (Imam Masjid & Pendeta), 2 aparat desa (Kepala Dusun & Sekretaris Desa), serta 2 perwakilan korporasi (Koordinator Keamanan & Humas PT Wilmar).

Dimensi Kemiskinan Kultural

Marjinalisasi struktural yang berlangsung dalam jangka panjang di Desa Batang Sepunggol telah mereproduksi kemiskinan kultural yang termaterialisasi ke dalam lima dimensi utama:

Tabel 1. Ringkasan Respon yang Muncul.

Dimensi Kemiskinan Kultural	Deskripsi / Indikator Lapangan	Kutipan Informan Kunci
Fatalisme dan Sikap Pasrah	Masyarakat mengembangkan sikap pasrah menerima kemiskinan sebagai takdir permanen yang tidak bisa diubah, sebagai respons adaptif akibat buntunya jalur mobilitas sosial formal.	"Sudah dari dulu begini keadaannya, Bapak. Bapak saya buruh sawit, saya juga buruh sawit, anak saya mungkin juga akan buruh sawit. Mau sekolah pun percuma karena ijazah tinggi pun tidak ada gunanya kalau tidak ada koneksi dan modal." (M.S., 45 tahun, Buruh Harian Lepas)
Orientasi Ekonomi Jangka Pendek	Keterbatasan upah Buruh Harian Lepas (BHL) yang rendah (Rp80.000–Rp100.000/hari) memaksa rumah tangga menerapkan strategi <i>hand-to-mouth economy</i> (fokus pemenuhan hari ini) tanpa akumulasi modal atau tabungan.	"Gaji hari ini habis untuk makan hari ini. Kadang beli rokok, kadang nongkrong sebentar. Besok kerja lagi, begitu terus. Tidak ada pikiran untuk menabung karena menabung pun tidak cukup, buat apa." (A.N., 38 tahun, Buruh Harian Lepas)

Rendahnya Aspirasi Pendidikan Antargenerasi	Munculnya ketidakpercayaan terhadap efektivitas pendidikan untuk memperbaiki nasib. Orang tua membatasi capaian akademik anak (hanya SMP/SMA) guna mempercepat transisi anak ke pasar kerja perkebunan.	"Yang paling menyedihkan itu... anak-anak yang sudah tidak punya cita-cita tinggi. Baru kelas 6 SD sudah bicara mau kerja di kebun sawit. Orang tuanya pun tidak mendorong karena mereka sendiri tidak percaya pendidikan bisa mengubah nasib." (H.A., 58 tahun, Tokoh Agama/Imam Masjid)
Normalisasi Kemiskinan dan Delegitimasi Hukum Formal	Masyarakat membangun sistem nilai alternatif yang menolak legalitas formal HGU perusahaan dengan memunculkan klaim historis-moral atas tanah leluhur mereka.	"Hampir semua tetangga pernah ambil sawit perusahaan. Itu bukan mencuri namanya menurut kami. Tanah itu dulu tanah orang tua kami, perusahaan yang mencuri dari kami. Jadi kami ambil sedikit itu hanya mengambil yang memang hak kami." (B.S., 41 tahun, Pelaku Ngobrok)
Fragmentasi Sosial dan Melemahnya Solidaritas	Tekanan ekonomi yang ekstrem mengikis modal sosial (<i>social capital</i>) desa, menciptakan kompetisi pragmatis antar-individu, mereduksi tradisi gotong royong, dan memicu kecurigaan komunal (isu informan perusahaan).	"Sekarang susah sekali mengumpulkan warga untuk kegiatan bersama. Semua sibuk dengan urusan perut masing-masing. Kepercayaan antar warga pun berkurang, karena ada yang jadi informan perusahaan, ada yang tidak." (D.R., 35 tahun, Sekretaris Desa)

Source: Sintesis penulis berdasarkan dokumen yang ditinjau.

Pencurian Sawit Sebagai Strategi Bertahan Hidup

Praktik pengambilan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit korporasi oleh warga lokal—atau yang dikenal dengan istilah *ngobrok*—merupakan sebuah tindakan terstruktur dengan pola operasional dan justifikasi moral yang mapan.

Tabel 2. Ringkasan Respon yang Muncul.

Pencurian Sawit Sebagai Strategi Bertahan Hidup	Mekanisme & Indikator Lapangan	Kutipan Informan Kunci
Modus Operandi dan Jaringan Penjualan	Bergerak dari pola individual (dini hari, menggunakan karung goni, hasil 30–70 kg) hingga pola kelompok terorganisir (2–4 orang dengan pembagian peran pemanen, pengangkut motor modifikasi, dan pengawas; hasil 100–250 kg). Hasil curian dialirkan cepat melalui pengepul informal dengan potongan harga Rp1.000–Rp1.500/kg dari harga pasar.	"Kami jual ke pengepul yang sudah kenal. Mereka tidak tanya dari mana asalnya, pura-pura tidak tahu... Tapi kami terima saja, yang penting laku dan cepat." (A.N., 38 tahun, Pelaku Ngobrok, Wawancara April 2026)
Faktor Intensifikasi	Aktivitas ngobrok tidak konstan melainkan berfluktuasi tajam mengikuti empat determinan: ketidakpastian siklus upah Buruh Harian Lepas (BHL), lonjakan harga TBS di pasar abu-abu, kegagalan realisasi program CSR/kebun plasma perusahaan, serta guncangan finansial domestik yang mendesak (darurat).	"Anak saya pernah sakit demam berdarah, butuh biaya Rp500.000 untuk ke puskesmas dan beli obat. Saya tidak punya uang sama sekali. Malam itu juga saya pergi ambil sawit..." (R.H., 38 tahun, Masyarakat Lokal, Wawancara April 2026)
Konstruksi Legitimasi Moral dan Teologis	Komunitas merumuskan sistem pembenaran etis kolektif melalui tiga narasi utama: klaim pemulihan hak historis atas tanah leluhur, relativisme skala kerugian korporasi besar,	"Ada yang datang tanya... apakah boleh secara agama mengambil sawit perusahaan? Saya bilang haram... Tapi mereka kemudian berargumen, bagaimana kalau untuk memberi makan anak yang

Dimensi Manajemen Pelaku	Psikologis: Identitas	serta negosiasi teologis mengenai adaptasi konsep "kedaruratan pangan" (fikih darurat). Pelaku mengadopsi dualisme perilaku (dramaturgi) untuk menavigasi diri secara aman. Mereka memisahkan ruang sosial secara ketat: menampilkan kepatuhan semu terhadap hukum formal di ruang publik luar (front stage), namun bersikap sangat terbuka di dalam lingkaran internal komunitas yang saling melindungi (back stage). kelaparan? Ada yang mengutip hadis tentang darurat." (H.A., 58 tahun, Tokoh Agama/Imam Masjid, Wawancara April 2026) "Saya tidak langsung cerita ke Bapak karena tidak tahu siapa Bapak ini. Tapi setelah saya kenal dan percaya, baru saya cerita. Di sini semua tahu siapa yang ngobrok dan siapa yang tidak, tapi kita jaga satu sama lain." (F.S., 29 tahun, Masyarakat Lokal, Wawancara Mei 2026)
--------------------------------	--------------------------	--

Source: Sintesis penulis berdasarkan dokumen yang ditinjau.

PEMBAHASAN

Kemiskinan Kultural sebagai Dampak Struktural

Temuan lapangan menunjukkan adanya keselarasan dengan tesis Oscar Lewis (1966) mengenai manifestasi *culture of poverty*. Namun, studi ini menegaskan bahwa kemiskinan kultural di Desa Batang Sepunggol bukanlah watak bawaan ataupun karakter asli masyarakat. Karakter pasrah, fatalistis, dan orientasi jangka pendek merupakan produk sampingan dari kemiskinan struktural yang dipicu oleh model ekspansi bisnis PT Wilmar. Eksklusi lahan komunal selama berdekade-dekade mengikis etos kerja agraris mandiri dan memaksa masyarakat beradaptasi dengan mengembangkan sub-kultur baru guna melonggarkan tekanan struktural tersebut.

Ekonomi Moral dan Senjata Kaum Lemah

Melalui lensa James C. Scott (1976, 1985), fenomena *ngobrok* dikonseptualisasikan sebagai bentuk *everyday resistance* (perlawanan sehari-hari) yang berakar pada *subsistence ethic* (etika subsistensi). Dengan memegang prinsip *safety-first*, tindakan para "ninja sawit" didorong oleh rasionalitas mengamankan batas minimum kelangsungan hidup (isi piring di rumah), bukan motif keserakahan kapitalistik. Gerakan ini bersifat anonim, tersebar, dan menghindari konfrontasi langsung dengan instrumen keamanan korporasi. Secara psikososial, tindakan ini sekaligus menjadi katarsis bagi warga untuk menegaskan agensi mereka dan menunjukkan penolakan laten terhadap penguasaan ruang hidup oleh kapitalis besar.

Akumulasi Primitif dan Hegemony Hukum Kelas

Dalam perspektif Karl Marx (1867), ekspansi HGU oleh korporasi merupakan bentuk nyata dari *primitive accumulation*—pemisahan paksa produsen (petani lokal) dari alat produksinya (tanah ulayat). Transformasi paksa dari petani mandiri menjadi kelas proletar (BHL) melahirkan alienasi ekonomi yang akut. Hukum formal negara di tingkat tapak bekerja sebagai instrumen kelas borjuasi untuk mengamankan hak milik kapital dan mengkriminalisasi klaim historis warga. Kendati demikian, resistensi warga di Batang Sepunggol membuktikan

adanya batas analisis materialistik Marx; konflik yang terjadi di lapangan bukan semata-mata memperebutkan nilai surplus ekonomi, melainkan akumulasi dari perjuangan moral, harga diri, dan keadilan historis komunitas yang terpinggirkan.

Kolonisasi *Lifeworld* dan Kebalikan Stigma

Menggunakan skema Jürgen Habermas (1984), krisis sosial dipicu oleh kolonisasi sistem terhadap dunia kehidupan (*lifeworld*). PT Wilmar mengekspansi logika uang dan kekuasaan birokratisnya ke dalam tatanan nilai komunal warga melalui penguasaan lahan dan penyumbatan saluran komunikasi yang setara (CSR sepihak). Distorsi komunikatif ini memaksa warga memutus kepatuhan terhadap sistem dan melahirkan tindakan *ngobrok* sebagai bentuk "bahasa komunikasi" alternatif. Secara mikro-sosiologis, Erving Goffman (1959, 1963) membantu menjelaskan bagaimana para pelaku mengelola ruang sosial mereka melalui mekanisme dramaturgi. Terjadi dikotomi tegas antara panggung depan (*front stage*) yang menampilkan kepatuhan semu di hadapan aparat/perusahaan, dengan panggung belakang (*back stage*) tempat normalisasi pencurian diorganisir secara kolektif. Menariknya, fungsi stigma kriminalitas tidak berlaku di dalam struktur internal komunitas. Di tingkat lokal, predikat "ninja sawit" mengalami inversi makna menjadi simbol keberanian dan kecerdikan moral melawan dominasi asimetris korporasi global.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika sosial-ekonomi masyarakat Desa Batang Seponggol di sekitar perkebunan PT Wilmar merupakan siklus kausalitas antara kemiskinan struktural dan kultural. Sub-kultur yang terbentuk—seperti sikap fatalistik, orientasi jangka pendek (*hand-to-mouth economy*), rendahnya aspirasi pendidikan antargenerasi, dan fragmentasi sosial—terbukti bukanlah watak bawaan masyarakat. Kondisi tersebut merupakan produk reproduksi dari marjinalisasi struktural jangka panjang akibat eksklusi lahan ulayat menjadi HGU korporasi tanpa kompensasi yang adil dan belum terealisasinya janji kebun plasma. Sebagai respons adaptif terhadap tekanan tersebut, praktik pengambilan sawit sepihak (*ngobrok* atau *ninja sawit*) bertransformasi menjadi strategi subsistensi yang terstruktur secara sosial, bukan tindakan kriminal murni. Beroperasi dalam pola individual maupun kelompok, intensitas praktik ini berfluktuasi mengikuti guncangan ekonomi domestik darurat dan ketidakpastian upah buruh harian lepas (BHL). Komunitas membangun sistem nilai alternatif yang menormalisasi tindakan ini melalui tiga justifikasi moral-teologis kolektif: klaim pemulihan hak historis tanah leluhur, relativisme skala kerugian terhadap korporasi raksasa, dan adaptasi konsep fikih darurat pangan.

Secara teoretis, fenomena ini merefleksikan konvergensi empat perspektif sosiologis-antropologis yang saling melengkapi. Praktik *ngobrok* menjadi bentuk *everyday resistance* (perlawanan sehari-hari) berbasis etika subsistensi James C. Scott demi batas aman kelangsungan hidup, sekaligus manifestasi konflik kelas akibat *primitive accumulation* Karl Marx yang dilegalkan hukum negara. Krisis agraria ini juga memperlihatkan kolonisasi *lifeworld* oleh *system* Jürgen Habermas yang menyumbat dialog setara, serta dioperasikan secara dramaturgi melalui pisau analisis Erving Goffman, di mana pelaku menampilkan kepatuhan hukum semu di panggung depan (*front stage*) namun membalikkan makna stigma kriminal menjadi simbol keberanian lokal di panggung belakang (*back stage*).

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (2023). Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik.
- BPS Provinsi Sumatera Utara. (2023). Profil Kemiskinan Sumatera Utara 2023. Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (4th Ed.). Thousand Oaks, Ca: Sage Publications.
- Estomihi Lumban Raja, F. (2024). Strategi Bertahan Hidup Keluarga Petani Kelapa Sawit Di Duri, Kabupaten Bengkalis. In *Jisa: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama E-Issn* (Vol. 7, Number 2).
- Hudayana, I., & Nurhadi, N. (2020). Memaknai Realitas Kemiskinan Kultural Di Pedesaan: Sebuah Pendekatan Partisipatoris. *Journal Of Social Development Studies*, 1(1), 14–26. <https://doi.org/10.22146/jsds.205>
- Ikhsan, I., Hajad, V., & Maulida, I. (2025). Paradoks Kemakmuran: Mengungkap Dampak Produksi Kelapa Sawit Terhadap Kemiskinan Di Pedesaan Indonesia. *Journal Of Economics, Bussiness And Management Issues*, 2(3), 273–286. <https://doi.org/10.47134/jebmi.V2i3.638>
- Laila, I. P., Raiva Aprilia, D., & Hosnah, A. U. (2025). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Di Ruang Publik: Analisis Kebijakan Kriminal Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. <https://doi.org/10.61104/alz.V3i5.2583>
- Lewis, O. (1966). The Culture Of Poverty. *Scientific American*, 215(4), 19–25. <http://www.jstor.org/stable/24931078>
- Margaret, M. (2023). Situational Crime Prevention Dalam Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit Di Pt Bintara Tani Nusantara, Sumatera Barat. *Ikraith-Humaniora*. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.V7i3>
- Marx, K. (1867). *Capital: A Critique Of Political Economy. Volume I: The Process Of Production Of Capital*.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *Manifesto Of The Communist Party*.

- Moh. Fikri Zulfikar, Djoko Saryono, Moch. Syahri, & Jumahar. (2025). Teori Resistansi James C. Scott Sebagai Kajian Representasi Sastra. *Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 01(1), 2025. <https://doi.org/10.33367/Multatuli.V1i1.6200>
- Nainggolan, H. L., Gulo, C. K., Waruwu, W. S. S., Egentina, T., & Manalu, T. P. (2021). Management Strategy On Smallholders Oil Palm Farming During The Covid-19 Pandemic In Subdistrict Of Stm Hilir, Deli Serdang District, North Sumatra Province, Indonesia. *Agro Bali*, 4(2), 260–275. <https://doi.org/10.37637/Ab.V4i2.724>
- Puspita, D., Manik, S., Wardaya, S., & Widiyarti, D. (2025). The Phenomenon Of Ngobrok (Palm Oil Fruit Theft) Case Study: Sibak Village Community, Ipuh District, Mukomuko. *Journal Of Law, Politic And Humanities*. <https://doi.org/10.38035/Jlph.V5i3>
- Rafly, A., Nabila, A., Aulia, D., Hasibuan, J. S., Lubis, M. I. M., & Muary, R. (2026). Ketahanan Keluarga Pedagang Pasar Tradisional dalam Menghadapi Tekanan Ekonomi di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 2413-2419.
- Scott, J. C. (1976). *The Moral Economy Of The Peasant: Rebellion And Subsistence In Southeast Asia*. Yale University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tuti Alawiyah, & Farhan Setiawan. (2021). Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa. *Jurnal Sosiologi Usk*.
- Vira Khairuria, R., Juita, E., Geografi Universitas Pgri Sumatera Barat, P., & Geografi Universitas Pgri Sumatera Barat Alamat, P. (2025). 316 Analisis Spasial Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10, 2477–2143.